

ANALISIS EFEKTIVITAS OPSKAMLA KOARMADA I DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN MENJAGA KEAMANAN LAUT

Yudik Fujiyanto

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Jakarta Selatan, Indonesia

ABSTRAK

Sebagai jalur strategis, ALKI memiliki potensi tantangan keamanan yang beragam, termasuk pelanggaran hukum, *illegal fishing*, dan penyelundupan. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan Opskamla, seperti pengembangan sumber daya, peningkatan kompetensi personel dalam aspek hukum dan operasional, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan analisis data melalui wawancara dan aplikasi NVivo, yang menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas Opskamla dapat dicapai melalui beberapa langkah, termasuk peningkatan kompetensi personel melalui pelatihan berkala, penerapan teknologi canggih seperti Radar dan Drone, serta peningkatan integrasi intelijen untuk mendeteksi dan merespons ancaman secara lebih cepat. Selain itu, sinergi antara TNI AL dengan *stakeholder* maritim lainnya, baik di tingkat nasional maupun regional, terbukti menjadi faktor kunci dalam meningkatkan keberhasilan operasi. Edukasi masyarakat pesisir juga perlu ditingkatkan agar masyarakat memahami peran mereka dalam menjaga keamanan laut dan kelestarian ekosistem maritim. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif, melibatkan kerjasama lintas sektor dan penggunaan teknologi, untuk menghadapi tantangan keamanan di wilayah ALKI dan mendukung penegakan hukum laut secara efektif.

Kata kunci: Opskamla, Koarmada I, ALKI, Penegakan Hukum, Keamanan Maritim.

ABSTRACT

As a strategic route, The Sea Passage of the Indonesian Archipelago has the potential for diverse security challenges, including law violations, illegal fishing, and smuggling. This study identifies various opportunities that can be utilized in the implementation of Opskamla, such as resource development, increasing personnel competence in legal and operational aspects, and strengthening coordination between related agencies. This study uses a qualitative methodology with data analysis through interviews and NVivo applications, which shows that increasing the effectiveness of Opskamla can be achieved through several steps, including improving personnel competencies through periodic training, the application of advanced technologies such as Radar and Drones, and improving intelligence integration to detect and respond to threats more quickly. In addition, the synergy between the Indonesian Navy and other maritime stakeholders, both at the national and regional levels, has proven to be a key factor in increasing the success of operations. The education of coastal communities also needs to be improved so that people understand their role in maintaining marine security and preserving maritime ecosystems. This research emphasizes the importance of a comprehensive approach, involving cross-sectoral cooperation and the use of technology, to confront security challenges in the The Sea Passage of the Indonesian Archipelago region and support effective enforcement of the law of the sea.

Keywords: Maritime security operations, First Fleet Command, The Sea Passage of the Indonesian Archipelago, Law Enforcement, Maritime Security

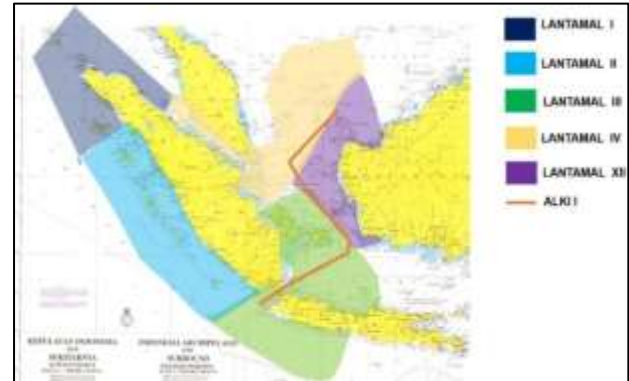
A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Setelah disahkannya Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 atau lebih dikenal dengan UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) dan selanjutnya Indonesia meratifikasi dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengesahan dari UNCLOS 1982, dimana dalam aturan tersebut diatur mengenai konsep negara kepulauan, termasuk untuk menetapkan cara penarikan garis pangkal lurus kepulauan, dalam menetapkan titik dasar sebagai acuan menetapkan batas maritim di wilayah laut tersebut dan berlakunya aturan hukum laut. Pengakuan tersebut diimplementasikan dalam adanya kewajiban dari negara kepulauan tersebut untuk menetapkan alur pelayaran internasional yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh para pengguna laut yang akan melintas di perairan kepulauan negara pantai tersebut (Pushidrosal, 2018.). Sesuai dengan amanat tersebut, Indonesia telah menyediakan jalur pelayaran internasional di perairan kepulauan dengan menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, ALKI II dan ALKI III sebagai alur laut kepulauan Indonesia yang disahkan dan diatur dalam pemanfaatannya melalui hukum nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6, 1996) (Peraturan Pemerintah RI Nomor 37, 2002).

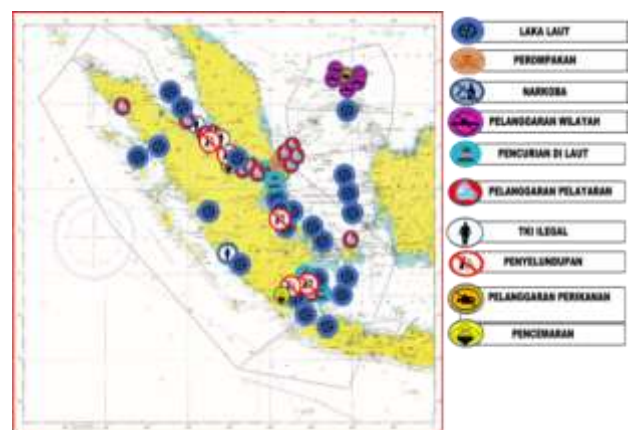
Dengan ditetapkannya ALKI, selain dampak positif juga dapat menimbulkan potensi ancaman dan pelanggaran terhadap kepentingan nasional tersebut, antara lain seperti illegal fishing, penyelundupan, tindak pidana pelayaran oleh kapal-kapal asing, pencemaran lingkungan dan pelanggaran wilayah serta kejadian laka laut. Kondisi geografi Indonesia memiliki posisi terbuka yang setiap saat dapat menjadi peluang bagi negara lain untuk masuk dan melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia dengan

berbagai dampak yang ditimbulkannya.



Gambar 1. Peta wilayah Kerja Koarmada I dan Jajaran dan overlay ALKI I yang termasuk dalam Wilayah Kerja Koarmada I
Sumber: Koarmada I, 2024

Potensi Ancaman di ALKI tentu akan berdampak kepada lingkungan perairan dan pulau sekitarnya.. Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Pengamanan ALKI I merupakan tugas tanggung jawab TNI Angkatan Laut antara lain melaksanakan tugas TNI matra laut dibidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi Nasional sesuai ketentuan hukum Nasional dan hukum Internasional yang telah di diratifikasi (Undang-Undang Nomor 34, 2004)



Gambar 2. Peta Kerawanan di wilayah Kerja Koarmada I dan Jajaran
Sumber: Koarmada I, 2024

Jenis pelanggaran pidana yang sering terjadi di wilayah ini antara lain kejahatan perompakan laut, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan kegiatan ilegal lainnya. Selain itu, juga terdapat pelanggaran

terhadap peraturan pengelolaan sumber daya laut, seperti penangkapan ikan secara ilegal, pembuangan sampah di laut, dan kerusakan terumbu karang.

Tabel 1. Data pelanggaran dalam Operasi Keamanan Laut

No.	Tahun	Jumlah kapal		Keterangan
		Diperiksa	Terbukti	
1.	2021	24	24	Cukup bukti untuk diproses hukum
2.	2022	7	6	Cukup bukti untuk diproses hukum
3.	2023	2	Nihil	Tidak cukup bukti diijinkan melanjutkan pelayaran

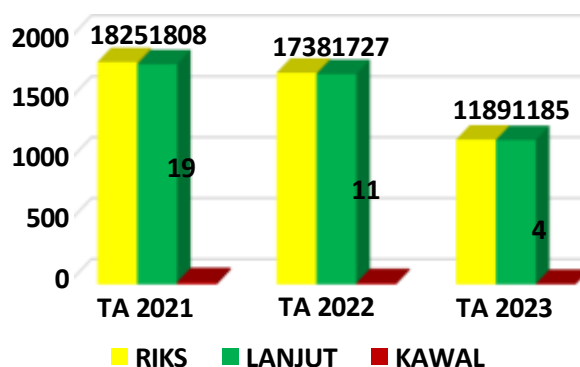
Sumber: Sops Koarmada I yang diolah oleh Peneliti

Data Pada tabel 1 sangat penting untuk memantau dan menilai keamanan laut di wilayah ALKI I. Dengan mengetahui jumlah dan jenis pelanggaran yang terjadi, pihak yang berwenang dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memberantas dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa yang akan datang. Pemerintah melalui Mabes TNI dan sebagai pelaksana adalah Koarmada I selaku unsur pelaksana operasi dari Koarmada RI yang memiliki tugas-tugas operasi dan tugas-tugas pembinaan. Adapun fungsi yang diselenggarakan Koarmada I meliputi penyelenggaraan operasi intelijen maritim untuk mendukung operasi laut, penyelenggaraan operasi militer untuk perang baik gabungan maupun mandiri, dan penyelenggaraan operasi militer selain perang berupa operasi laut sehari-hari maupun operasi keamanan laut (Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 25, 2022).

Perwujudan dari pelaksanaan tugas-tugas Koarmada I tersebut adalah penggelaran kekuatan yang disusun dalam gelar penindakan dan gelar permanen. Aplikasi dari gelar penindakan adalah penyelenggaraan operasi yang salah satunya adalah operasi keamanan laut dan operasi pengamanan ALKI. Sedangkan aplikasi dari gelar permanen adalah penempatan pangkalan- pangkalan yang

melaksanakan dukungan logistik dan operasi keamanan laut terbatas.

Adapun selama pelaksanaan operasi keamanan laut di ALKI I sepanjang tahun 2021-2023, Koarmada I telah melakukan penindakan terhadap segala bentuk pelanggaran di laut dan ancaman-ancaman yang terjadi di ALKI I sebagai upaya penegakan hukum di wilayah yurisdiksi dan perairan Indonesia seperti hasil operasi yang tertera pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Hasil Operasi Koarmada pada Operasi Keamanan Laut di ALKI I 2021-2023

Sumber: Koarmada I, 2024

Operasi Pengamanan ALKI I diharapkan dapat memberikan dampak *deterrence* dalam menjamin keamanan laut. ALKI I merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia dan alur laut perlintasan perdagangan sehingga membawa konsekuensi memiliki potensi antara lain rawan terhadap kriminalitas di lautan, seperti perompakan terhadap kapal-kapal dagang dan kapal yang bermuatan ekonomis lainnya maupun pelanggaran pelayaran maupun penyelundupan lewat laut. Dalam hasil operasi Koarmada I tersebut, mayoritas pelanggaran oleh kapal-kapal di area ALKI I tersebut adalah melakukan pelanggaran tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh kapal bendera Indonesia maupun bendera asing dengan tidak memperhatikan dan memahami pemanfaatan ALKI I. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan keamanan maritim, Koarmada I telah melaksanakan Gelar Operasi Keamanan Laut di ALKI I untuk periode tahun 2023 yang merupakan bagian dari upaya

berkelanjutan dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia serta memastikan keselamatan pelayaran dan keberlangsungan aktivitas maritim yang ada di kawasan strategis tersebut. Operasi keamanan laut yang dijalankan mencakup berbagai aspek, mulai dari patroli keamanan, latihan bersama, hingga pengecekan dan pengawasan terhadap kapal-kapal yang melintas di ALKI I. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan ilegal seperti perompakan, pencurian ikan, penyelundupan, serta pelanggaran lain yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi maritim nasional.

Dari penjelasan diatas, permasalahan yang terjadi saat ini dikelompokkan menjadi tiga pokok permasalahan yaitu belum efektifnya pelaksanaan Opskamla, penyampaian informasi intelijen terkait dengan adanya potensi ancaman di daerah operasi dapat mendukung Opskamla di ALKI I dan kerjasama antara TNI Angkatan Laut serta *stakeholder* maritim terkait dalam pelaksanaan operasi, pembagian sektor pola operasi yang dilaksanakan. Dalam melaksanakan penelitian dengan judul **“Efektivitas Opskamla Koarmada I di Alur Laut Kepulauan Indonesia I dalam Penegakan Hukum dan Menjaga Keamanan Laut”** dengan metode kualitatif dan pengolahan data menggunakan Nvivo sebagai *tool*.

2. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang muncul dan berkaitan erat dengan situasi diatas sehingga masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

- a. Kurangnya kompetensi para pelaku penegakan hukum laut, termasuk personel TNI Angkatan Laut, dalam aspek hukum internasional dan nasional, strategi penegakan hukum, serta teknik operasional di laut, sehingga harus ditingkatkan.
- b. Kurangnya penyampaian informasi intelijen terkait dengan adanya potensi ancaman di daerah operasi yang dapat

mendukung Opskamla di ALKI I.

- c. Tantangan dalam koordinasi antar instansi terkait, baik pada tingkat nasional maupun regional, telah menghambat efektivitas operasi keamanan laut dan penegakan hukum di ALKI.
- d. Keterbatasan sumber daya, termasuk kapal dan teknologi pengawasan, merupakan hambatan dalam pemantauan dan penindakan terhadap pelanggaran di wilayah ALKI.
- e. Kurangnya upaya penyuluhan dan pendidikan bagi masyarakat, terutama masyarakat pesisir dan nelayan, tentang hukum laut dan pentingnya menjaga keamanan serta kelestarian lingkungan maritim.
- f. Tantangan dalam mengatasi pencemaran lingkungan dan pelestarian ekosistem laut di wilayah ALKI yang memerlukan strategi dan tindakan konservasi yang komprehensif.
- g. Belum terpenuhinya kebutuhan untuk mengintegrasikan teknologi canggih dalam sistem pengawasan laut, termasuk penggunaan satelit, *drone*, dan sistem AIS (*Automatic Identification System*), merupakan hambatan dalam meningkatkan efektivitas pemantauan dan penegakan hukum.
- h. Belum optimalnya revisi kebijakan dan regulasi yang mendukung operasi keamanan laut dan penegakan hukum di ALKI bisa mengakibatkan kegagalan dalam menyesuaikan dengan dinamika keamanan maritim yang terus berubah.

3. Pembatasan Masalah

Supaya proses penelitian dapat terarah, fokus dan mendalam sehingga memperjelas lingkup permasalahan peneliti membatasi masalah hanya pada:

- a. Pelaksanaan Opskamla oleh Koarmada I di ALKI I guna mendukung tugas TNI Angkatan Laut.
- b. Belum efektivitasnya pelaksanaan

Opskamla oleh Koarmada I di ALKI I guna mendukung tugas TNI Angkatan Laut.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah yang telah dijelaskan dan diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan Opskamla oleh Koarmada I di ALKI I yang efektif?
- b. Bagaimana penyampaian informasi intelijen terkait dengan adanya potensi ancaman di daerah operasi dapat mendukung Opskamla di ALKI I?
- c. Bagaimana kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan *stakeholder* maritim terkait dalam pelaksanaan operasi, pembagian sektor pola operasi yang dilaksanakan?

5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah diatas, untuk menganalisis hal tersebut maka tujuan dari penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Menganalisis pelaksanaan Opskamla oleh Koarmada I di ALKI I yang efektif.
- b. Menganalisis penyampaian informasi intelijen terkait dengan adanya potensi ancaman di daerah operasi dapat mendukung Opskamla di ALKI I.
- c. Menganalisis kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan *stakeholder* maritim terkait dalam pelaksanaan operasi, pembagian sektor pola operasi yang dilaksanakan.

6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang analisis efektivitas pelaksanaan Opskamla oleh Koarmada I di ALKI I guna mendukung tugas TNI Angkatan Laut memberi manfaat:

- a. Manfaat teoritis. Diharapkan dapat dapat berguna sebagai khasanah ilmu pengetahuan

terkait dengan dengan pelaksanaan Opskamla oleh Koarmada I.

- b. Manfaat praktis. Sebagai bahan pertimbangan kepada pimpinan Koarmada I terkait dengan pelaksanaan, menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengaplikasian gelar kekuatan pelaksanaan Opskamla di ALKI I,

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Deskripsi Teori

Penelitian ini dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan ketidakefektifan operasi keamanan laut di Koarmada I, khususnya di ALKI I. Fokus permasalahan mencakup pola operasi, keterbatasan sumber daya, serta sinergi dan pertukaran informasi dengan *stakeholder* maritim terkait. Dengan teori berikut sebagai panduan (David J. Lawless, 1997):

- a. Efektivitas

Efektivitas berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna. Efektivitas memiliki tiga tingkatan:

- 1) Efektivitas Individu.
- 2) Efektivitas Kelompok.
- 3) Efektivitas Organisasi.

Efektivitas juga mencakup kegunaan hasil yang dicapai, kinerja unsur atau komponen dalam sistem, serta kepuasan pengguna atau klien. Efektivitas menunjukkan seberapa baik suatu program dalam mencapai hasil yang diharapkan.

- b. Doktrin TNI Angkatan Laut Jalesveva Jayamahe

Dalam menjalankan fungsi utamanya, TNI Angkatan Laut mengadopsi Doktrin Jalesveva Jayamahe. Untuk operasi di wilayah

ALKI I, tanggung jawab berada di bawah Komando Armada I yang berbasis di Tanjungpinang, memiliki tugas utama untuk melaksanakan operasi intelijen maritim yang bertujuan mendukung kegiatan operasi laut. Selain itu juga bertugas melaksanakan operasi tempur laut yang mendukung Operasi Militer Perang (OMP), baik dalam kerangka operasi gabungan maupun operasi yang berdiri sendiri. Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Untuk menunjang efektivitas dari semua operasi tersebut, tugas khusus dilaksanakan oleh Komando Armada I. Ini meliputi:

- 1) Membangun dan memelihara kapabilitas serta kekuatan dari komponen Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT)..
- 2) Mengembangkan kemampuan dalam peperangan laut, yang mencakup latihan dan peningkatan strategi tempur.
- 3) Menjaga kesiapan operasional untuk melaksanakan baik OMP maupun OMSP.
- 4) Meningkatkan potensi maritim agar dapat dijadikan kekuatan pertahanan dan keamanan negara.

Angkatan Laut di seluruh dunia memiliki peran yang berlaku secara universal, yang lebih dikenal dengan Trinitas Peran Angkatan Laut (Ken Booth, 1973) yaitu:

- 1) Peran militer (*Military Role*). Dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga, serta menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim.
- 2) Peran polisionil (*Constabulary Role*) (Undang-Undang RI Nomor 34, 2004). Dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban

di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional.

3) Ketiga peran diplomasi (*Diplomacy Role*). Merupakan peran yang sangat penting bagi setiap Angkatan Laut di seluruh dunia. Peran ini dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara atau beberapa negara lain dalam keadaan damai atau pada situasi konflik.

c. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap keamanan nasional yang meliputi aspek ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personel, komunitas, dan politik. Ancaman ini juga mencakup kriminalitas umum, kejahatan terorganisasi lintas negara, separatisme, terorisme, spionase, sabotase, kekerasan politik, konflik horizontal, perang informasi, dan serangan siber, yang semuanya bisa mengganggu ketertiban dan keamanan dalam negeri serta pertahanan nasional. Ancaman yang dihadapi tidak hanya bersifat tradisional tetapi juga nontradisional, mencakup ancaman asimetris serta berbagai bentuk kejahatan seperti terorisme, separatisme, dan serangan siber.

d. Teori Sinergitas.

Konsep ini melibatkan prinsip integrasi dan kerjasama antara individu, kelompok, dan lembaga untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien (Mashita, 2023).

e. Teori Penegakan Hukum

Lembaga penegak hukum berperan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, tetapi penanganan masalah hukum yang bersifat yuridis politis dapat meningkat menjadi konflik jika melibatkan penggunaan kekerasan. Penegakan hukum bertujuan untuk merealisasikan ide dan konsep hukum yang diinginkan oleh rakyat, namun prosesnya melibatkan berbagai faktor dan tidak selalu sederhana.

f. Analisis Nvivo

Penggunaan NVivo dalam penelitian kualitatif memberikan banyak keuntungan yaitu memberikan fleksibilitas dalam mengkategorikan data teks dan meningkatkan kualitas hasil yang dihasilkan, membantu mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk menganalisis data secara manual, membantu dalam mengidentifikasi tren, melakukan silang informasi, dan menemukan tema yang relevan dalam penelitian, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih baik¹.

2. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan efektivitas Opskamla Koarmada I di ALKI I dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan laut, hubungan antar variabel dibangun berdasarkan konsepsi teoritik dari penelitian sebelumnya sebagai berikut ini:

a. Analisis Operasi *Malacca Strait Sea Patrol* (MSSP) guna menjaga Keamanan Maritim.

Tesis Fitriana C. Ardi (2023) ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan data melalui wawancara dengan pihak-pihak. Dalam tesis ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan operasi MSSP yang dilakukan oleh Guskamla Koarmada I perlu ditingkatkan khususnya dalam hal dukungan kesiapan KRI, karena keberhasilan pola operasi selain ditentukan oleh tujuan operasi dan tugas operasi, juga ditentukan oleh kesiapan dukungan KRI yang memiliki teknologi modern, kehadiran di laut dan pemeliharaan KRI, kerjasama dengan lembaga terkait, hasil yang telah dicapai, intelijen, dan kerjasama dengan negara pantai. Dengan mempertimbangkan tantangan dan hambatan yang mungkin muncul di masa depan, langkah-langkah perbaikan dan adaptasi akan menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas operasi MSSP

dalam jangka panjang².

b. Implementasi Strategi Pengendalian Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) dalam mendukung Ketahanan Nasional.

Jurnal oleh AS Hidayat (2019) ini menggunakan metode kualitatif, Penelitian ini melihat secara komprehensif ancaman-ancaman keamanan yang muncul dari luar Indonesia ke wilayah sekitar ALKI. ALKI I Adapun hasil penelitian adalah keterbatasan kapasitas dan kapabilitas alutsista aparat membuat tingkat ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan wilayah di sekitar ALKI menjadi tinggi dan sulit diatasi oleh Indonesia sendiri. Sementara, upaya mengatasinya melalui latihan dan operasi kerjasama di lapangan bukannya tidak membawa resiko. Karena, mengundang keterlibatan asing dalam latihan bersama, untuk masuk jauh ke wilayah perairan Kepulauan Indonesia, di luar jalur ALKI yang disediakan, semakin memberikan kesempatan pihak asing untuk melakukan pengintaian secara langsung.³

c. Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia: Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran Di Wilayah Perairan Indonesia.⁴

3. Kebaruan Penelitian (*State of The Art*).

Ini adalah lokasi dilaksanakannya penelitian. Terkait dengan lokasi tersebut sampai saat ini belum ada penelitian yang menganalisis efektivitas Opskamla Koarmada I di ALKI I dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan laut.

4. Kerangka Penelitian.

Kerangka penelitian adalah deskripsi dari latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah yang akan dipecahkan.

² Fitriana, *Analisis Operasi Malacca Strait Sea Patrol (MSSP) Guna Menjaga Keamanan Maritim Di Selat Malaka*. Seskoal, 2023; hal 23

³ Hidayat, Abdiyan Syaiful, *Implementasi strategi pengendalian alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dalam mendukung ketahanan nasional*. (Jurnal Ketahanan Nasional 25.3, 2019): hal 313-330.

⁴ Hutagalung, Siti Merida, *Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia*. Jurnal Asia Pacific Studies 1.1 (2017): hal 75-91.

¹ Bazeley, Patricia, and Kristi Jackson. *Qualitative Data Analysis with NVivo*. Edited by Jai Seaman. The Second, 2007; hal 44

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengolahan data Nvivo, beberapa bagian penting yang perlu dipahami oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian kualitatif antara lain (Oky Sugianto, Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan): Penelitian kualitatif tidak terlalu fokus kepada angka atau nilai dalam pengukuran variabelnya, tidak melakukan suatu pengujian menggunakan metode statistik, Bersifat elaborasi, peneliti diperbolehkan menggali informasi lebih dalam terhadap objek penelitian dengan tidak bergantung pada pengukuran numerik dan Lebih tidak terstruktur dibandingkan dengan penelitian kuantitatif (Creswell, 2016).

2. Unit Analisis

Unit analisis pada penelitian ini fokus pada *expert* dalam analisis efektivitas opskamla Koarmada I di ALKI I dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan laut dengan menggunakan narasumber penelitian. Selain itu unit analisis berupa data, penelitian ini fokus pada data pendukung dari permasalahan efektivitas opskamla Koarmada I di ALKI I dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan laut.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang peneliti akan gunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder.

1) Data Primer berdasarkan wawancara dan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada: Asops Pangkoarmada I, Asops Danguspurla I, Komandan Lanal Banten, Dansatrol Lantamal III, Dansatrol Lantamal IV, dan Komandan KRI Surik 645.

2) Data sekunder, yaitu data atau informasi

yang telah dikumpulkan oleh orang lain. Data sekunder tersebut didapatkan dari studi pustaka berupa studi literatur, buku dan referensi lainnya.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti melaksanakan pengamatan langsung (Sugiyono, 2013). Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh perspektif subjektif dari narasumber yang dapat memberikan wawasan yang berharga. Informasi tambahan seperti latar belakang, nilai-nilai, dan norma-norma yang relevan dapat terungkap melalui interaksi langsung dalam wawancara.

5. Teknik Pengumpulan dan Teknik Pengolahan Data

a. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

b. Teknik Pengolahan Data

Data yang merupakan hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan tersebut akan dilaksanakan pengolahan dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak (*software*) Nvivo. Dari hasil tinjauan literatur dan wawancara, akan dibuat ringkasan tentang topik-topik yang relevan. Kemudian, ringkasan tersebut akan dimasukkan ke dalam perangkat Nvivo.

6. Teknik Analisis Data

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data dianggap sudah jenuh. Analisis data pada model ini terdiri dari tiga tahapan kegiatan, yaitu (Miles, 1984):

- a. Reduksi data. Mengumpulkan data yang cukup banyak dari lapangan memerlukan pencatatan yang teliti dan rinci.
- b. Penyajian data. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data.
- c. Penarikan kesimpulan/interpretasi data. Kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat sementara dan dapat berubah berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan selama proses pengumpulan data berikutnya.

Untuk memastikan data dapat dipercaya secara ilmiah, pengecekan keabsahan data diperlukan, menurut Sugiyono, melibatkan beberapa aspek, yaitu:

- a. Keterpercayaan (*credibility*):
- b. Keteralihan (*transferability*):
- c. Kebergantungan (*dependability*):
- d. Kepastian (*confirmability*):

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan tentang Opskamla Koarmada I di ALKI I, dihasilkan pembahasan terkait gambaran umum permasalahan:

a. Gambaran Umum ALKI I

Indonesia menetapkan ALKI berdasarkan interpretasi Konvensi Hukum Laut 1982. Pada tahun 2002, Indonesia kemudian resmi menetapkan tiga jalur ALKI, yaitu ALKI I, ALKI II, dan ALKI III. ALKI diartikan sebagai jalur yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan transit yang terus menerus, langsung, secepat mungkin, dan tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan serta laut teritorial Indonesia yang berdampingan dengan laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif lainnya. Jalur ALKI I khususnya melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Sunda, dan Samudra Hindia. Jalur ini berfungsi

untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melalui Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda menuju Samudra Hindia dan sebaliknya, serta dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya, yang disebut sebagai Alur Laut Cabang I A.



Gambar 4. Jalur ALKI I.

Sumber: Ilustrasi Alur Laut Kepulauan Indonesia, kkp.go.id, 2024

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Operasi Keamanan Laut

Operasi keamanan laut yang dilaksanakan oleh Koarmada I di ALKI I melibatkan berbagai unit dan elemen dari TNI Angkatan Laut untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Sementara itu, Staf Operasi Guspurla I memainkan peran penting dalam melaksanakan operasi tempur laut di ALKI I. Guspurla I, sebagai komando tempur laut di bawah Koarmada I, bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai operasi keamanan laut yang melibatkan unsur-unsur tempur, termasuk KRI. Operasi ini meliputi patroli rutin, penegakan hukum di laut, serta respons terhadap ancaman yang mungkin timbul di wilayah ALKI I. Selain itu, Satuan Patroli Lantamal III dan Lantamal IV juga memiliki peranan yang signifikan dalam menjaga keamanan di ALKI I. Satrol bertugas untuk melaksanakan patroli rutin, mendeteksi ancaman, dan melakukan tindakan pencegahan terhadap kegiatan ilegal di perairan tersebut. Dukungan dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten juga sangat penting, sehingga kapal-kapal seperti KRI dapat terus beroperasi tanpa hambatan. Keseluruhan upaya ini memastikan

bahwa wilayah ALKI I tetap aman dan terjaga, serta kedaulatan Indonesia di laut tetap tegak.

c. Permasalahan Opskamla oleh Koarmada I di ALKI I, dapat dipetakan sebagai berikut:

1) Kurangnya kompetensi para pelaku penegakan hukum laut, termasuk personel TNI Angkatan Laut, dalam aspek hukum internasional dan nasional, strategi penegakan hukum, serta teknik operasional di laut, sehingga harus ditingkatkan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan dan program pendidikan khusus sangat diperlukan.

2) Kurangnya penyampaian informasi intelijen terkait dengan adanya potensi ancaman di daerah operasi yang dapat mendukung Opskamla di ALKI I. Informasi intelijen yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk mendukung operasi keamanan laut, karena memungkinkan identifikasi dini dan penanganan cepat terhadap ancaman yang muncul.

3) Tantangan dalam koordinasi antar instansi terkait, baik pada tingkat nasional maupun regional, dapat menghambat efektivitas operasi keamanan laut dan penegakan hukum di ALKI. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya mekanisme koordinasi yang lebih baik dan komunikasi yang lebih terstruktur antara semua instansi yang terlibat.

4) Keterbatasan sumber daya, termasuk kapal dan teknologi pengawasan. Ini membatasi kemampuan untuk melakukan patroli laut secara intensif dan untuk menindak pelanggaran hukum di wilayah perairan yang luas. Teknologi pengawasan yang canggih, seperti radar, satelit, dan sistem pelacakan otomatis, sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pemantauan dan penegakan hukum.

5) Kurangnya upaya penyuluhan dan pendidikan bagi masyarakat, tentang hukum laut dan pentingnya menjaga keamanan serta kelestarian lingkungan maritim. Upaya edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut. Dengan keterlibatan masyarakat yang lebih baik, operasi keamanan laut dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

6) Tantangan dalam mengatasi pencemaran lingkungan dan pelestarian ekosistem laut di wilayah ALKI yang memerlukan strategi dan tindakan konservasi yang komprehensif.

7) Belum terintegrasinya teknologi canggih dalam sistem pengawasan laut, termasuk penggunaan satelit, *drone*, dan sistem AIS (*Automatic Identification System*), merupakan hambatan dalam meningkatkan efektivitas pemantauan dan penegakan hukum. Tanpa teknologi ini, upaya pengawasan dan penegakan hukum menjadi kurang efisien dan lebih terbatas.

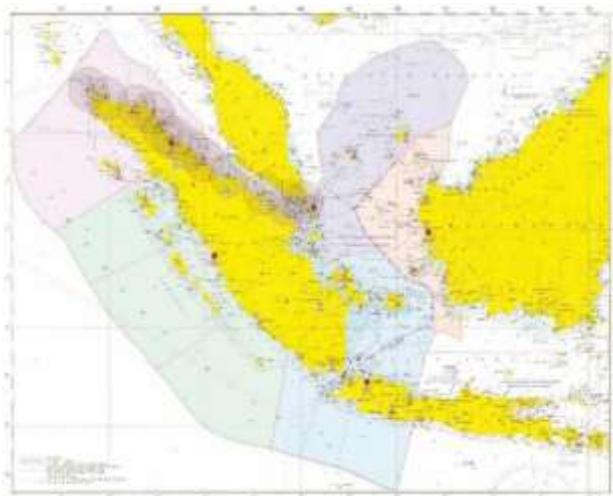
8) Belum optimalnya revisi kebijakan dan regulasi yang mendukung operasi keamanan laut dan penegakan hukum di ALKI bisa mengakibatkan kegagalan dalam menyesuaikan dengan dinamika keamanan maritim yang terus berubah. Dengan kebijakan yang tepat dan regulasi yang mendukung, pelaksanaan Opskamla oleh Koarmada I dapat lebih adaptif dan efektif dalam menghadapi tantangan keamanan di wilayah ALKI I.

d. Gambaran Umum Koarmada I

Koarmada I bertugas melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), melaksanakan operasi laut sehari-hari dan operasi tempur laut dalam rangka pengendalian

laut, proyeksi kekuatan ke darat lewat laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut, membina kekuatan, kemampuan dan kesiapan operasional KRI, Koarmada I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan intelijen maritim guna mendukung pelaksanaan operasi laut sehari-hari, operasi tempur laut dan operasi keamanan laut;
- 2) Menyelenggarakan operasi laut sehari-hari serta operasi keamanan laut di seluruh perairan yang menjadi tanggung jawab Koarmada I sesuai dengan petunjuk/kebijakan Panglima;
- 3) Menyelenggarakan operasi tempur laut dalam rangka operasi pertahanan dan operasi keamanan dalam negeri baik secara angkatan tunggal maupun secara gabungan berdasarkan rencana operasi/kebijakan Panglima;
- 4) Menyelenggarakan dukungan logistik operasi dan angkutan laut untuk mendukung operasi laut sehari-hari dan operasi tempur laut;
- 5) Menyelenggarakan OMP dan OMPS; dan
- 6) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Panglima TNI mengenai hal yang berhubungan dengan bidang tugas.



Gambar 4.2 Wilayah Kerja Koarmada I
Sumber: Gelar Operasi Koarmada I, 2024

Saat ini Koarmada I diperkuat oleh 59 KRI yang terdiri dari:

- | | |
|--------------------|----------|
| 1) Satkor | : 14 KRI |
| 2) Satfib | : 7 KRI |
| 3) Satban | : 3 KRI |
| 4) Satran | : 2 KRI |
| 5) Satkor | : 12 KRI |
| 6) Satrol Lantamal | : 21 KRI |

2. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilaksanakan melalui teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

- a. Observasi. Observasi difokuskan pada opskamla di ALKI I oleh Koarmada I, sebagai bagian dari upaya mendukung operasi TNI Angkatan Laut.
- b. Wawancara. Peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap: Asops Pangkoarmada I, Asops Danguspurla I, Komandan Lanal Banten, Dansatrol Lantamal III, Dansatrol Lantamal IV, dan Komandan KRI Surik 645.
- c. Dokumentasi. Metode ini melibatkan penelusuran, pengkajian, dan analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian.
- d. Studi Kepustakaan. Dalam hal ini, studi yang digunakan diantaranya: Analisis operasi *Malacca Strait Sea Patrol* oleh Fitriana, Laporan Pelaksanaan Badik Segara Koarmada I, Paparan Gelar Operasi Koarmada I, Rencana Manuver Koarmada I

Selanjutnya proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat *software* Nvivo.

3. Pengolahan data

Dengan keunggulan-keunggulan perangkat lunak NVivo dalam analisis data kualitatif, peneliti tertarik untuk menggunakan perangkat lunak ini sebagai alat bantu dalam analisis data. Berikut langkah analisis data terkait dengan Opskamla Koarmada I di ALKI I.

a. Penentuan Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Opskamla oleh Koarmada I di ALKI I, mengevaluasi bagaimana penyampaian informasi intelijen terkait potensi ancaman di daerah operasi dapat mendukung Opskamla di ALKI I, serta menganalisis kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan pemangku kepentingan maritim terkait dalam pelaksanaan operasi, termasuk pembagian sektor dan pola operasi yang diterapkan.

b. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam aplikasi Nvivo dijelaskan dengan tiga langkah sebagai berikut:

- 1) Membuat Proyek Nvivo. Langkah pertama adalah membuat proyek baru di NVivo ini akan menjadi tempat penyimpanan dan pengorganisasian semua data dan informasi terkait penelitian.
- 2) Mengimpor Data. Setelah proyek dibuat, langkah kedua dalam pengolahan data dengan mengimpor data ke dalam NVivo Data yang diimpor diklasifikasikan menjadi data observasi, wawancara dan studi literatur.
- 3) Membuat *Node*. *Node*. Dalam langkah ini, dibuat kategori yang sesuai dengan topik atau tema penelitian yaitu sesuai dengan yang dikonsepkan dalam *Mind Map*.

c. Transkripsi dan *Encoding*

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengkodean data yang melibatkan dan menghubungkan bagian-bagian data dengan *node* yang relevan. *Encoding* dapat dilaksanakan dengan menandai atau membagi data menjadi bagian yang lebih kecil dan menghubungkannya dengan node yang sesuai. Hal ini membantu dalam mengidentifikasi pola, tema, atau hubungan antara data dalam analisis.

d. Analisis Data.

Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis data menggunakan NVivo:

- 1) *Matrix Coding*. Yang memungkinkan peneliti untuk membuat matriks untuk membandingkan hubungan antara *node-node* atau konsep-konsep tertentu dalam data. Disini dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Opsla yang efektif, informasi intelijen yang diterima dan kerjasama *stake holder* di ALKI I berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan Opskamla Koarmada I di ALKI I.
- 2) *Word Frequency Query*. Memungkinkan peneliti dalam menemukan frekuensi dan pola kata-kata penting dalam data. Ini membantu mengidentifikasi kata-kata kunci atau tema yang muncul secara signifikan dalam data. Informasi ini dapat berguna dalam memahami fokus atau topik yang dominan dalam data.



Gambar 4.4 *Word Frequency Query*

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Dari gambar, diperoleh data bahwa sepuluh kata yang paling sering muncul di *word query* adalah pemeriksaan dan mencurigakan.

- 3) *Crosstab*
Alat ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan dan mengkategorikan antara data berdasarkan berbagai *node*, *cases* maupun atribut kode yang telah diterapkan dalam proyek NVivo.

4) *Cluster Analysis*

Memungkinkan peneliti dalam meng-identifikasi kelompok atau *cluster* data yang serupa berdasarkan pola pengkodean. Dari yg dihasilkan *Cluster Analysis*, dapat diketahui analisis *coding similarity* yang bersumber dari data nodes dan cases. Sehingga dapat dijelaskan bahwa pola atau tema yang muncul dalam data secara keseluruhan adalah serupa.

5) *Visualizations*

NVivo menyediakan fitur untuk menghasilkan visualisasi seperti diagram jaringan, grafik, atau peta konsep. Dari alat ini bisa mengidentifikasi hubungan antara *nodes* yang telah disusun dari berbagai tema dan kontribusinya terhadap kategori yang lebih besar. Kategori yang terbesar adalah analisa aspek mekanisme dan penindakan, sedangkan kategori terkecil adalah strategi konservasi.

5. Pembahasan dan Interpretasi

Analisis pembahasan dan interpretasi dalam *NVivo* melibatkan pengkodean data, pembuatan kategori dan hierarki, analisis, eksplorasi data, interpretasi temuan, dan penyusunan laporan.

a. Pelaksanaan Opskamla oleh Koarmada I di ALKI I yang efektif.

Dalam konteks maritim, sinergitas memungkinkan Koarmada I untuk bekerja sama tidak hanya dengan entitas militer lain seperti Bakamla atau Polisi Air, tetapi juga dengan lembaga sipil dan masyarakat lokal. Dengan membangun hubungan yang harmonis dan produktif antar berbagai pemangku kepentingan, Operasi Keamanan Maritim di perairan strategis seperti ALKI I bisa berlangsung lebih efisien dan efektif, menghasilkan lingkungan maritim yang lebih aman dan terjaga. Integrasi dan kerjasama ini memperkuat kemampuan *collective response*, memaksimalkan sumber daya yang ada, dan

mengoptimalkan hasil operasi dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional di wilayah perairan tersebut.

Menurut data dari wawancara terhadap para narasumber kemudian dilanjutkan pengolahan data menggunakan *Nvivo* diperoleh data terkait pelaksanaan Opskamla oleh Koarmada I di ALKI I yang efektif, diinterpretasikan sebagai berikut:

Dalam hal peningkatan kompetensi hukum dan operasional personel TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum laut di ALKI I. Koarmada I telah meng-implementasikan beberapa langkah strategis yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan keefektifan operasi. Berikut adalah rincian dari pendekatan tersebut:

1) Pelatihan dan Pendidikan Berkala mengenai hukum laut internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan peraturan nasional terkait. Pelatihan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman personel tentang yurisdiksi, hak, dan kewajiban Indonesia sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

2) *Workshop* dan Seminar yang melibatkan pakar hukum maritim, akademisi, dan praktisi untuk membahas isu-isu terkini dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan penegakan hukum di laut, serta memperbarui pengetahuan personel tentang perubahan dalam hukum maritim.

3) Sertifikasi Profesional di bidang hukum maritim yang diakui secara internasional, untuk meningkatkan kredibilitas dan kemampuan dalam menangani situasi hukum di laut.

Dalam hal peningkatan Kompetensi Operasional, strategi oleh Koarmada I sebagai berikut:

1) Latihan Operasional Terpadu termasuk penangkapan kapal ilegal dan operasi SAR (*Search and Rescue*). Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas operasional dalam situasi nyata.

2) Penggunaan Teknologi Canggih. Integrasi teknologi surveilans modern seperti radar, AIS (*Automatic Identification System*), dan *drone* untuk memperkuat kemampuan deteksi dan pengawasan di ALKI I, sehingga memungkinkan respon yang lebih cepat dan akurat terhadap pelanggaran.

3) Kerjasama Antar Lembaga instansi lain seperti Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta kepolisian perairan untuk memastikan sinergi dan efektivitas yang lebih besar dalam operasi keamanan laut.

Dalam hal implementasi dan evaluasi, yang dilaksanakan oleh Koarmada I adalah:

1) Patroli Rutin dan Intensif untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum di laut, serta memberikan efek jera terhadap pelaku kegiatan ilegal.

2) Evaluasi dan *Debriefing* setelah setiap operasi untuk mengidentifikasi apa yang berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki, serta untuk memastikan bahwa semua operasi berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

3) Edukasi dan Sosialisasi dengan memberikan penyuluhan kepada komunitas maritim tentang pentingnya mematuhi hukum laut dan konsekuensi dari kegiatan ilegal, sebagai upaya preventif dan pembangunan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

4) Mekanisme pengawasan dan penindakan yang lebih efektif di wilayah ALKI terhadap insiden kecelakaan,

illegal fishing, dan penyelundupan.

Dalam peningkatan pengawasan dan penindakan di wilayah ALKI I, Koarmada I telah mengimplementasikan serangkaian strategi yang efektif untuk mengatasi insiden kecelakaan, *illegal fishing* (penangkapan ikan ilegal), dan penyelundupan. Berikut ini adalah beberapa elemen kunci dari mekanisme yang diterapkan:

- 1) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan.
- 2) Patroli dan Kehadiran Aktif di Laut.
- 3) Kerjasama Antar Lembaga.
- 4) Penegakan Hukum dan Proses Hukum yang Efektif.
- 5) Penggunaan Data dan Intelijen.
- 6) Pendidikan dan Penyuluhan.
- 7) Kampanye Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.
- 8) Modernisasi Alat dan Kapal.

Dalam hal edukasi masyarakat mengenai hukum laut dan pentingnya menjaga keamanan dan kelestarian lingkungan maritim.. Operasi ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada edukasi masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi yang diimplementasikan dalam upaya ini:

- a) Edukasi dan Penyuluhan Hukum Laut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan yang mengatur aktivitas maritim dan penting-nya kepatuhan terhadap hukum untuk menjaga keamanan kelestarian lingkungan.
- b) Kerjasama dengan Berbagai Pihak. Kolaborasi ini memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan efektif.
- c) Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Ini termasuk pelatihan tentang teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan pengelolaan kegiatan wisata laut.
- d) Penggunaan Teknologi untuk Pengawasan dan Edukasi. Teknologi modern

seperti radar, satelit, dan *drone* digunakan untuk pengawasan yang lebih efektif.

e) Penyelenggaraan Event dan Festival Maritim. Kegiatan ini sering melibatkan simulasi penyelamatan, diskusi panel, dan pameran interaktif.

f) Pendekatan Restoratif dalam Penegakan Hukum bertujuan untuk mencegah pelanggaran di masa depan dan meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi dari tindakan ilegal.

Dalam menghadapi dinamika yang berkembang, Koarmada I memerlukan revisi kebijakan dan regulasi yang mendukung Operasi Keamanan Laut dan penegakan hukum di ALKI I secara efektif. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang bisa diambil:

- 1) Peninjauan dan Pembaruan Regulasi. Regulasi yang Adaptif serta Peraturan Pelayaran dan Penangkapan Ikan.
- 2) Pengintegrasian Teknologi Canggih. Berupa Pemanfaatan Teknologi dan Kebijakan Teknologi.
- 3) Kerjasama Regional dan Internasional Patroli Bersama dan Latihan Gabungan serta Pertukaran Informasi.
- 4) Kapabilitas Responsif dan Fleksibel dengan menyusun dan menyempurnakan SOP yang fleksibel dan adaptif dan meningkatkan kemampuan operasi gabungan antar unit dan instansi untuk respons terkoordinasi dan efisien.
- 5) Penguatan Hukum dan Kerangka Sanksi dan Pengadilan dan Penuntutan:
- 6) Program Pendidikan dan Pelatihan
 - a) Melakukan investasi dalam program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
 - b) Rutin mengadakan simulasi dan latihan untuk mengasah kemampuan dan kesiapan personel dalam menghadapi situasi darurat.

b. Penyampaian informasi intelijen terkait dengan adanya potensi ancaman di daerah operasi dapat mendukung Opskamla di ALKI I

Penyampaian informasi intelijen terkait dengan adanya potensi ancaman di daerah operasi, merupakan elemen kritical yang mendukung efektivitas Opskamla di ALKI I selain itu juga memungkinkan pengidentifikasian dan pengendalian ancaman yang mungkin merambat dari satu sektor ALKI ke sektor lain, mendukung ketahanan nasional dengan cara yang sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis. Menurut data dari penelitian diperoleh data bahwa penyampaian informasi intelijen terkait dengan adanya potensi ancaman di daerah operasi dapat mendukung Opskamla di ALKI I, diinterpretasikan sebagai berikut:

1) Integrasi teknologi canggih seperti satelit, *drone*, dan sistem AIS diperlukan untuk meningkatkan pemantauan dan penegakan hukum di laut. Berikut adalah beberapa manfaat dan aplikasi dari penggunaan teknologi ini dalam Opskamla oleh Koarmada I:

- a) Pemantauan Luas dan Detil
 - (1) Satelit. Menyediakan cakupan luas dan kontinu atas wilayah maritim, memungkinkan deteksi dini dan pemantauan aktivitas seperti pelayaran ilegal, pencemaran laut, dan kegiatan perikanan yang tidak sah.
 - (2) *Drone*. Dioperasikan untuk mendapatkan gambaran mendetail dan *real-time* dari area yang spesifik, sangat berguna untuk verifikasi target dan pemantauan di area yang sulit dijangkau oleh patroli biasa.
- b) Deteksi dan Identifikasi Target. Sistem AIS memungkinkan identifikasi dan pelacakan kapal secara *real-time*, yang sangat membantu dalam memonitor pergerakan kapal dan mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan regulasi maritim.

c) Koordinasi dan Respons yang Efisien. Integrasi Data. Membantu dalam pengambilan keputusan dan koordinasi tindakan penegakan hukum secara tepat waktu.

d) Peningkatan Keamanan Laut. Penggunaan teknologi meningkatkan kemampuan untuk mencegah kegiatan ilegal dan merespons secara cepat terhadap insiden, sehingga secara keseluruhan meningkatkan keamanan untuk semua pengguna laut.

e) Dukungan untuk Keputusan Strategis dan Taktis.

2. Keterbatasan sumber daya seperti kapal dan teknologi terhadap pemantauan dan penindakan di wilayah ALKI I.

Keterbatasan sumber daya seperti kapal dan teknologi memang dapat menjadi tantangan signifikan. Namun, pemanfaatan efektif dari informasi intelijen dapat meminimalisir dampak dari keterbatasan ini dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasi. Strategi penggunaan intelijen untuk mengatasi keterbatasan sumber daya oleh Koarmada I adalah:

- a) Prioritisasi tindakan berdasarkan ancaman
- b) Optimalisasi Patroli dan Pemantauan
- c) Koordinasi dengan Lembaga Lain
- d) Penggunaan Teknologi Canggih Secara Efektif
- e) Antisipasi dan Respon Cepat terhadap Ancaman

c. Bagaimana kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan *stakeholder* terkait dalam pelaksanaan operasi, pembagian sektor pola operasi yang dilaksanakan

Kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan *stakeholder* maritim terkait dalam pelaksanaan operasi keamanan maritim menggambarkan aplikasi praktis dari teori sinergitas. Dengan membagi zona operasi ke dalam sektor-sektor tertentu, TNI Angkatan Laut dan lembaga seperti Bakamla, Kepolisian Perairan, serta

komunitas nelayan lokal, dapat mengoptimalkan sumber daya dan keahlian masing-masing. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman secara tepat dan cepat, tetapi juga memastikan bahwa setiap *stakeholder* memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya bersama.

Menurut dari wawancara terhadap para narasumber kemudian dilanjutkan pengolahan data menggunakan Nvivo diperoleh data terkait kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan *stakeholder* maritim terkait dalam pelaksanaan operasi, pembagian sektor pola operasi yang dilaksanakan, diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Efektivitas koordinasi antar instansi operasi keamanan laut dan penegakan hukum di ALKI I yang sangat bergantung pada integrasi, komunikasi, dan sinergi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi ini:

- a) Pembentukan Komando Gabungan. Dengan membentuk komando gabungan yang melibatkan semua *stakeholder*, semua pihak dapat beroperasi di bawah satu kepemimpinan yang terkoordinasi untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan yang lebih efisien.
- b) Sistem Komunikasi Terintegrasi. Pengembangan sistem komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi real-time antar instansi sangat krusial.
- c) Pertukaran Informasi dan Intelijen. Ini akan membantu dalam mengidentifikasi ancaman lebih awal dan mempersiapkan respons yang tepat.
- d) Pelatihan dan Latihan Bersama secara reguler antar instansi meningkatkan interoperabilitas dan memperkuat kerja sama tim. Latihan ini harus mencakup skenario yang beragam.
- e) Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab. sehingga dapat menghindari duplikasi kerja dan

memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien.

f) Protokol Koordinasi Standar akan membantu semua instansi bergerak secara sinergis.

g) Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi Bersama, memastikan bahwa hukum diikuti dan dijalankan secara konsisten.

2. Strategi konservasi yang komprehensif dalam mengatasi pencemaran lingkungan dan pelestarian ekosistem laut di wilayah ALKI I. Pendekatan yang terintegrasi adalah kunci untuk suksesnya inisiatif konservasi ini. Berikut adalah beberapa langkah utama yang dapat diambil oleh Koarmada I:

a) Integrasi konservasi dengan keamanan maritim, memastikan bahwa upaya penegakan hukum juga mendukung tujuan pelestarian termasuk perlindungan habitat penting, spesies yang terancam punah, dan pemeliharaan keanekaragaman hayati laut.

b) Pembentukan protokol lingkungan khusus yang mengatur tindakan pencegahan dan responsif terhadap insiden lingkungan, seperti tumpahan minyak atau kegiatan perikanan yang merusak.

c) Zonasi perlindungan: Menetapkan zona perlindungan khusus yang fokus pada konservasi ekosistem penting.

d) Kolaborasi dengan Lembaga Penelitian dan Konservasi seperti dengan universitas, lembaga riset, dan NGO untuk memanfaatkan keahlian ilmiah dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya alam.

e) Program edukasi dan kesadaran masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya konservasi.

f) Pemantauan dan evaluasi bersama. Membangun sistem pemantauan yang efektif untuk secara terus menerus menilai kondisi ekosistem laut.

g) Pengembangan kebijakan dan regulasi

terpadu. Ini termasuk hukum yang mengatur aktivitas industri, perikanan, dan standar emisi untuk kapal.

h) Kerjasama regional dan internasional. Memperkuat kerjasama lintas negara dengan negara-negara tetangga.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan terhadap analisis efektivitas Opskamla Koarmada I di Alur Laut Kepulauan Indonesia I dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan laut, sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Opskamla oleh Koarmada I di ALKI I yang efektif bergantung pada sinergi antar lembaga, penggunaan teknologi canggih, dan peningkatan kompetensi personel. Melalui komunikasi dan kerjasama antara para semua *stake holder* maritim, operasi keamanan laut di perairan strategis ini menjadi lebih efisien. Peningkatan kompetensi hukum dan operasional personel, didukung oleh pelatihan rutin dan teknologi seperti radar serta drone dapat memperkuat deteksi dan penegakan hukum di ALKI. Selain itu, edukasi masyarakat mengenai hukum laut dan kelestarian lingkungan maritim, serta penyesuaian kebijakan dan regulasi yang adaptif, turut meningkatkan efektivitas operasi dan memastikan keamanan laut yang berkelanjutan.

b. Penyampaian informasi intelijen yang akurat dan tepat waktu sangat penting dalam mendukung efektivitas Opskamla di ALKI I dan membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan ancaman, memungkinkan respons yang lebih cepat dan efisien meskipun terdapat keterbatasan sumber daya seperti kapal dan teknologi. Penggunaan teknologi canggih seperti satelit, drone, dan AIS memungkinkan pemantauan yang luas dan *real-time*, memfasilitasi koordinasi antar lembaga, serta mendukung keputusan strategis berdasarkan data yang akurat. Dengan integrasi intelijen dan teknologi, Koarmada I dapat

meminimalisir risiko, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan keamanan maritim secara keseluruhan di ALKI I.

c. Kerjasama antara TNI AL dan *stakeholder* maritim dalam pelaksanaan Operasi Keamanan Maritim di ALKI I menekankan pentingnya sinergitas antar instansi. Dengan membagi zona operasi ke dalam sektor-sektor tertentu, TNI AL bersama lembaga seperti Bakamla, Kepolisian Perairan, serta komunitas nelayan lokal, dapat memaksimalkan sumber daya dan keahlian masing-masing untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan respons terhadap ancaman maritim. Koordinasi yang baik memungkinkan pelaksanaan operasi lebih efisien, mulai dari pertukaran informasi dan intelijen hingga pelatihan bersama. Selain itu, sinergitas ini juga mendukung strategi konservasi lingkungan maritim, di mana TNI AL dan *stakeholder* bekerja sama untuk melindungi ekosistem laut melalui protokol khusus dan zona perlindungan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keamanan maritim tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan laut di ALKI I.

2. Rekomendasi

Setelah melakukan pembahasan terhadap hasil dari pengolahan data, selanjutnya peneliti memberikan rekomendasi teoritis dan praktis.

a. Rekomendasi Teoritis. Terdapat beberapa rekomendasi dapat dijadikan sebagai referensi sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan teori efektivitas, direkomendasikan untuk menerapkan pendekatan manajemen berbasis hasil dengan menetapkan indikator kinerja yang terukur untuk Operasi Keamanan Laut Koarmada I, serta membangun model kolaborasi *multistakeholder* yang melibatkan TNI AL, instansi pemerintah, masyarakat pesisir, dan sektor swasta. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, integrasi teknologi canggih seperti Radar

dan Drone untuk deteksi ancaman, serta pengembangan sistem evaluasi dan umpan balik yang terstruktur sangat penting. Teori sinergitas yang menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga perlu dikembangkan lebih lanjut dalam konteks operasi keamanan laut, supaya tidak hanya fokus pada respons ancaman, tetapi juga pada pencegahan dan pengelolaan ancaman secara proaktif.

- 2) Teori penegakan hukum di laut dapat dikembangkan dengan menambahkan aspek adaptif dalam menghadapi dinamika ancaman maritim yang terus berubah yang harus memperhitungkan kemampuan untuk mengatur prioritas penanganan ancaman berdasarkan data intelijen yang tepat waktu.

b. Rekomendasi Praktis

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang diperoleh, rekomendasi yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut: Mabes TNI Angkatan Laut perlu terus memperkuat infrastruktur teknologi pengawasan maritim dengan mengintegrasikan sistem pengawasan canggih seperti Satelit, Drone, dan AIS, selain itu juga perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait. Sedangkan Koarmada I perlu mengadakan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi personel dalam penggunaan teknologi terbaru dan teknik pengawasan maritim, termasuk pelatihan dalam analisis data dan pemanfaatan sistem pengawasan yang terintegrasi. Dengan memanfaatkan data dari berbagai sumber, seperti sensor dan laporan masyarakat, Koarmada I dapat meningkatkan deteksi dini terhadap ancaman dan penyimpangan perilaku di wilayah perairan. Sedangkan Guspurla I dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi dan sektor swasta untuk pengembangan dan implementasi inovasi dalam pengawasan maritim.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Barang Cetakan

Booth, Ken, *Navies and Foreign policy*, London, Groom Helm, 1973.

Bazeley, Patricia, and Kristi Jackson. *Qualitative Data Analysis with NVivo*. Edited by Jai Seaman. The Second, 2007; hal 44

Buntoro, Kresno, *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Creswell, John. W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

David j. Lawless, Gibson ,Ivancevich, Donnely, Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses, (Jakarta: Erlangga, 1997), hal 25-26

Fitriana, *Analisis Operasi Malacca Strait Sea Patrol (MSSP) Guna Menjaga Keamanan Maritim Di Selat Malaka*. Seskoal, 2023; hal 23

Hidayat, Abdiyan Syaiful, *Implementasi strategi pengendalian alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dalam mendukung ketahanan nasional*. (*Jurnal Ketahanan Nasional* 25.3, 2019): hal 313-330.

Hutagalung, Siti Merida, *Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia*. *Jurnal Asia Pacific Studies* 1.1 (2017): hal 75-91.

Kurnia, Aan, *Between Threats and Opportunities* Diantara Ancaman dan Peluang, Jakarta: Tim Petro Energy, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Smith, Johnathan A. *Diplomasi Maritim di Abad 21: Pendorong dan Tantangan*. Terjemahan oleh Ahmad Syarif. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019.

Kumar, Rajesh. *Batas Maritim dan Keamanan*

Kerjasama di Samudra Hindia. Terjemahan oleh Budi Raharjo. Jakarta: Springer Indonesia, 2018.

Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Rafika Aditama, 2016.

Pushidrosal, *Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia*. Jakarta: 2018.

2. Jurnal

Mashita, Sekar Mutiara, Dewi Rostyaningsih, and Hesti Lestari. *Sinergitas Stakeholder dalam Program Kampung Tematik Kuliner di Kelurahan Jatingaleh Kota Semarang*. *Journal of Public Policy and Management Review* 12, 2023; hal 33.

3. Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS.

Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Jakarta.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan hak Lintas ALKI.

Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 25 Tahun 2022.